Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 2, No. 2, 2020
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah

INSTRUMEN STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN MONETER KONVENSIONAL DAN ISLAM DALAM PENGENDALIAN INFLASI

Ega Rusanti[1], A.Syathir Sofyan[2] Syarifuddin[3], Nurfiah Anwar[4]

[1](UIN) Alauddin Makassar, Gowa
[2](UIN) Alauddin Makassar, Gowa
[3](UIN) Alauddin Makassar, Gowa
[4](UIN) Alauddin Makassar, Gowa
Korespondensi penulis, Email
[1]egarusanti22@gmail.com
[2]a.syathir@uin-alauddin.ac.id
[3] syarifuddin7890@gmail.com
[4] nurfiahanwar05@gmail.com, Telp: 085341938806

Abstrak

Kebijakan moneter Bank Indonesia dilakukan untuk memengaruhi kegiatan ekonomi riil dan stabilitas harga dengan menggunakan mekanisme transmisi yang ada. Dalam pelaksaaannya Bank Indonesia saat ini bertanggungjawab untuk mencapai sasaran moneter melalui instumen kebijakan jalur konvensional dan syariah diantaranya Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Dalam penulisan paper ini menggunakan kajian kepustakaan melalui analisis isi terhadap penelitian sebelumnya. Segala informasi yang didapatkan berkaitan dengan topik penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan serta bersifat deskriptif kualitatif. Hasil analisis yang didapatkan, menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan moneter konvensional melalui jalur suku bunga dengan SBI dan PUAB terbukti lebih mampu mempengaruhi JUB dan akhirnya mengendalikan inflasi. Namun pada instrumen kebijakan moneter jalur syariah dengan menggunakan SBIS dan PUAS dengan system Profit and loss sharing (PLS) dari berbagai hasil penelitian yang di analisis menemukan jika instrumen tersebut masih memilki andil yang kecil pada pengendalian inflasi namun terbukti memberikan kontribusi pada output sektor rill.

Kata Kunci *:Kebijakan Moneter Konvensional, Kebijakan Moneter Islam, Inflasi.*

Abstract

Bank Indonesia monetary policy was implemented to influence real economic activity and price stability by using existing transmission mechanisms. In its implementation, Bank Indonesia is currently responsible for achieving monetary targets through conventional and sharia policy instruments including Bank Indonesia Certificates (SBI), Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS), Interbank Money Market (PUAB) and Sharia Interbank Money Market (PUAS). . In writing this paper using literature review through content analysis of previous research. All information obtained related to this research topic was obtained from various sources of literature and was descriptive qualitative in nature. The analysis results obtained show that the effect of conventional monetary policy through the interest rate channel with SBI and PUAB is proven to be more able to

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 2, No. 2, 2020
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah

influence JUB and ultimately control inflation. However, in the sharia monetary policy instrument using SBIS and PUAS with the Profit and loss sharing (PLS) system, various research results analyzed found that the instrument still had a small share in controlling inflation but was proven to contribute to the real sector output.

Keywords: *Conventional Monetary Policy, Islamic Monetary Policy, Inflation.*

1. Pendahuluan

Kebijakan moneter memiliki fungsi utama dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi secara makro yang tercermin dalam kesempatan kerja yang tersedia cukup luas, stabilitas harga hingga perkembangan output rill yang semakin membaik. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi ini merupakan saluran yang akan menghubungkan perekonomian dengan kebijakan moneter. Transimi Kebijakan moneter bekerja dengan berbagai saluran diantaranya agregat moneter, nilai tukar, suku bunga, kredit, ekspektasi dan harga asset (Perry Warjiyo dan Agung Juda, 2002).

Sehubungan dengan hal tersebut, sejak adanya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 memicu berkembangya perekonomian berbasis syariah hingga saat ini. Menurut UU Perbankan No.7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998, Indonesia secara *de jure* resmi menggunakan sistem perbankan ganda *(dual banking system)* dimana bank syariah dan bank konvensional mampu bekerja secara bersamaan. (Muhammad Alfian, 2011) Kemudian, dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang ini secara resmi memberikan tanggung jawab baru kepada Bank Indonesia sebagai pemegang otoriter moneter ganda, yakni melaksanakan sistem kebijakan moneter secara konvensional dan juga syariah.

Salah-satu fungsi utama dari kebijakan moneter adalah sebagai pengendali inflasi, yakni menjaga stabilitas harga. Inflasi ialah peningkatan harga-harga umum atas barang maupun jasa, sehingga berakibat pada menurunya kekuatan membeli *(purchasing power)*. Penyebab umum inflasi yaitu :*Natural Inflation,* yakni terjadinya peningkatkan daya beli masyarakat secara rill, impor menurun sementara ekspor meningkat, hingga penurunan tingkat produksi. Selain itu penyebab lainnya adalah *human error inflation*misalnya :*excessive tax, corruption and bad administration,* dan *Emotional Market*. Selain itu pertumbuhan volume uang beredar yang cepat juga turut menjadi penyebab terjadinya inflasi (Ardianing Pratiwi, 2016).

Inflasi di Indonesia terjadi karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap nilai dollar AS sejak 14 Agsutus 1997, sistem nilai tukar mengambang *(Free floating exchange rate)* yang digunakan Indonesia memiliki arti jika nilai tukar diserahkan dan dibentuk pada mekanisme pasar dan berdasar pada hukum permintaan serta penawaran yang terjadi di pasar. Terjadinya depresiasi terhadap nilai tukar rupiah pada mata uang asing turut mengakibatkan terjadinya peningkatan nilai ekspor. Akibat dari hal tersebut harga barang domestik menjadi lebih murah dan mampu menarik minat konsumen luar negeri sehingga meningkatkan permintaan dan perlahan-lahan terjadi kenaikan harga dan pada akhirnya menyebabkan inflasi (Sipayung dan Putri Tista Enistin,2012)

Roger (2007) menemukan jika tren inflasi menunjukkan hubungan yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan perekonomian dan sasaran inflasi yang rendah atau stabil akan menunjukkan sisi positif untuk peningkatan keadaan ekonomi. Inflasi mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat akibatnya tingkat pendapatan juga akan menurun (Rogger Jeffery Hummel, 2020), Walaupun inflasi mempunyai dampak yang kurang menguntungkan untuk perekonomian, tetapi dalam jangka waktu

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 2, No. 2, 2020
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah

pendek akan ada *trade off* antara inflasi dengan pengangguran menggambarkan jika inflasi mampu menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi bisa digunakan untuk menyeimbangkan perekonomian negara. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan kordinasi dengan pemerintah dalam rangka mengendalikan laju inflasi.

Salah-satu bentuk pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter terhadap suku bunga. Suku bunga merupakan landasan bagi pelaku ekonomi. Perubahan pada suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral berimbas pada suku bunga pada perbankan, baik dalam bentuk suku bunga kredit maupun deposito serta berpengaruh pada instrumen kebijakan moneter konvensional lainnya sehingga secara makro akan mempengaruhi jumlah uang beredar (JUB) (Muhammad A Guntara,2015). Pada kebijakan moneter konvensional dalam mengendalikan JUB melalui jalur suku bunga biasanya doilakukan melalui instrumen kebijakan moneter dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Sementara dalam ekonomi islam, instrumen kebijakan moneter yang digunakan tidak menggunakan suku bunga namun berpacu pada imbal bagi hasil *(Profit and Loss Sharing)*.Instrumen-instrumen dalam pengendalian moneter menurut perkonomian Islam, terdiri dari: Cadangan Wajib Resmi/GWM, saham Publik terhadap Deposito Unjuk (Uang Giral), Target Pertumbuhan dalam M dan Mo, alokasi Kredit yang Berorientasi kepada Nilai, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).serta pembatasan Kredit.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan membandingkan instrument kebijkana moneter konvensional dan kebijakan moneter syariah. Nikita dan Suherman (2017) menemukan jika SBI dan Sukuk mampu mempengaruhi inflasi dalam jangka panjang, namun Sukuk memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding SBI, selain itu dalam jangka pendek diketahui keduanya belum mampu menekan inflasi secara signifikan (Nikita Indi Kumala dan Suherman Rosyidi :2017) Sementara Heri Sudarsono (2017) kebijakan BI menekan inflasi dengan cara meningkatkan suku bunga SBI yang kemudian meningkatkan suku bungadi PUAB sehingga mampu menarik uang beredar dan menekan inflasi, disisi lain inflasi merespon negatif kenaikan imbal bagi hasil pada SBIS dan tingkat likuiditas Bank Syariah yang cukup tinggi membuat PUAS tidak terlalu dimanfaatkan sehingga pengaruhnya terhadap inflasi relatif sangat lemah (Heri Sudarsono, 2017).

Pada kasus ini Bank Indonesia selaku pemangku otoritas moneter Indonesia untuk menggunakan instrumen moneter syariah yang pada dasarnya tidak berkiblat pada perubahan suku bunga melainkan melalui mekanisme bagi hasil sehingga diindikasi lebih mampu menekan inflasi. Pada instrumen kebijakan moneter konvensional dikenal Pasar Uang Antar Bank (PUAB) serta Sertifikat Bank Indonesia (SIB), namun dalam instrument syariah mengenal PUA syariah (PUAS) dan SBI Syariah (SBIS). PUAS dibagi atas Sertifikat Perdagangan Komiditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SIKA) dan Investasi Musharakah Antarbank (SIMA). Sedangkan pada SBIS menerapkan akad jualah, tetapi SBIS dapat juga diterbitkan oleh BI dengan menggunakan akad musyarakah, wadiah, mudharabah, wakalah, jua'lah dan qordh. Pada penelitian ini akan berfokus pada menganalisis dan membandingkan pengaruh dari SBI, SBIS, PUAB, dan PUAS terhadap pengendalian inflasi berdasarkan temuan-temuan dari beberapa penelitian terdahulu.

2. Metode

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan *(Library Research)*.Segala informasi yang didapatkan berkaitan dengan topik penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan serta bersifat deskriptif kualitatif. Ismail (2014) mengartikan

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 2, No. 2, 2020
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah

penelitian deskriptif ialah penelitian dengan maksud membuat deskripsi atau gambaran secara faktual, sistematis dan akurat tentang sifat-sifat dan hubungan dengan fenomena terkait. Sementara metode penelitian kulitatif diartikan sebagai suatu alat ukur/alat kualitatif yang dilakukan untuk merefleksi topik/objek penelitian (Rifki Ismail,2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dekomentasi dan menggunakan sumber data berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk bacaan atau referensi terkait topik penelitian berupa jurnal, buku, bacan online dan referensi kepustakaan lainnya. Sementara untuk metode analisis yang dilakukan melalui analisis kualitatif yaitu analisis isi *(content analysis)* yaitu teknik dengan melakukan penyelidikan data yang diperoleh secara sistematis, obyektif, dan generalisasi untuk memperoleh hasil data yang deskriptif. Metode analisis tersebut dilakukan untuk memahami konsep instrumen kebijakan moneter dalam teori konvensional dan teori ekonomi islam dalam mengendalikan inflasi, lalu membandingkan keduanya dengan menggunakan model studi komparatif. Metode berpikir ini akan berfokus pada analisis isi terhadap intrumen kebijakan moneter konvensional dan syariah yaitu dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dalam mengendalikan inflasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Instrumen Kebijakan Moneter Konvensional dalam Pengendalian Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kondisi terjadinya kenaikan jumlah uang beredar atau terjadinya kenaikan likuiditas Selain itu, penyebab inflasi lainnya adalah pengeleluaran pemerintah yang tinggi sehingga terjadi defisit. Dalam teori konvensional, defisit meningkatkan tekanan dalam pasar kredit sehingga suku bunga naik diiringi dengan peningkatan inflasi (Kiaee, 2007).

Salah-satu mekanisme transmisi kebijakan moneter yang digunakan dalam kebijakan moneter konvensionaluntuk mengendalikan inflasi adalah dengan melalui jalur suku bunga. Mekanisme jalur suku bunga ini berfokus pada perubahan terhadap struktur suku bunga di sektor keuangan lalu kemudian mempengaruhi permintaan uang dan akhirnya akan berpengaruh langsung terhadap inflasi. Pengaruh tingkat suku bunga terbukti mampu menekan laju inflasi di Malaysia (Yan, Y & Samba, M.C, 2010), di dominan negara di Asia juga menggunakan tingkat suku bunga kangsung untuk mempengaruhi tingkat inflasi secara lebih efektif (Tai, PN & Sek, S,K, 2011), Namun, Boschen dan Weise (2003) menemukan jika pengaruh suku bunga yang mengalami kenaikan berdampak biaya modal sehingga terjadi pembengkakan biaya produks, akibatnya transaksi impor akan lebih besar dari ekspor dan mengarah pada peningkatan inflasi pula.

Dalam rangka mengatasi tingginya inflasi, maka Bank Indonesia dapat mengendalikannya dengan cara mengeluarkan SBI untuk mengurangi dana yang beredar di masyarakat. Sertifikat Bank Indonesia ialah suatu surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia dalam bentuk mata uang rupiah sebagai surat pengakuan utang dalam jangka pendek serta juga sebagai salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka. SBI bisa dimiliki bank dan pihak lain yang telah ditetapkan oleh BI serta dapat dipindahtangakan. Selain itu, pembelian SBI dapat dilakukan pada pasar primer dan bisa diperjualbelikan di pasar sekunder dengan melalui mekanisme penjualan bersyarat dan penjualan/pembelian lepas.

SBI diterbitkan dan dijual dengan tujuan agar tidak terlalu banyak jumlah uang yang beredar sehingga inflasi dapat ditekan. Apabila inflasi dirasa dalam presentase yang tinggi maka Bank Indonesia akan menurunkan tingkat inflasi dengan mengambil tindakan dengan meningkatkan tingkat suku bunga SBI, begitupula sebaliknya (Muhammad

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 2, No. 2, 2020
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah

Taqiyuddin, 2012), Pengaruh suku bunga SBI terhadap inflasi dilihat dari kenaikan suku bunga SBI akan memicutingginya suku bunga jangka pendek dipasar uang. Begitu juga pada suku bunga berjangka panjang, para produsen akan merespon kondisi tersebut dengan cara mengurangi investasi, maka hal ini akan berdampak pada produksi dalam negeri *(output)* yang kian menurun sehingga pada akhirnya tingkat inflasi domestik menurun (Afaqa Hudaya, 2011).

Menurut Natsir (2011)perubahan suku bunga SBI berpegaruh pada likuiditas di pasar uang. Hal tersebut searah dengan penemuan Rabin & Hermawan (2013) yang mengungkapkan bahwa kontribusi SBI terhadap tingkat inflasi cukup besar. Pada saat bunga meningkat masyarakat akan lebih memilih melakukan penyimpanan dana di bank baik berbentuk deposito atau ke dalam tabungan dengan harapan imbal bunga yang besar.Sehingga peningkatan suku bunga SBI juga kemudian akan berdampak pada berkurangnya JUB di masyarakat sehinggaterjadi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa untuk keperluan konsumsi dan selanjutnya terjadi penurunan harga dan menurunkan inflasi.

Namun Erawati dan Llewelyn (2002:106) mengemukakan dampak lain pengendalian inflasi yang berkaitan langsung dengan tingkat suku bunga SBI. Menurutnya tingginya suku bunga malah memicu kelangkaan barang yang mendorong kenaikan harga, terutama dalam pengaruhnya secara jangka pendek. Fakta ini tergambar pada kebijakan uang ketat melalui peningakatan suku bunga dalam bentuk operasi pasar terbuka (OPT), sehingga menimbulkan masalah baru di sektor riil karena kurangnya uang di masyarakat sehingga menghambat aktivitas produksi dalam negeri, dampaknya terjadi kenaikan tajam pada harga-harga akibat langkanya produk di pasaran. Selain itu, Sheikh (2011) berpendapat jika suku bunga malah menciptakan kesempurnaan dalam pasar yang mengganggu penawaran dan permintaan sehingga terjadi kemerosotan ekonomi.

Bank sentral mengambil langkah menurunkan suku bunga SBI, yang selanjutnya akan di respon oleh suku bunga PUAB yang ikut turun.PUAB atau biasa dikenal dengan *interbank call money market* adalah sarana yang digunakan dengan tujuan mendorong pengembangan dalam pasar uang. Pada umumnya, terdapat dua jenis bentuk transaksi PUAB yaitu transaksi meminjam yang dimana bank akan memberikan pinjaman dana kepada bank lain, dan transaksi kedua yaitu transaksi pinjam yaitu aktivitas meminjam dana pada bank lainnya. Struktur jaringan tersebut, sejumlah bank akan menjadi titik pusat dalam transaksi pinjam-meminjam dalam lingkup PUAB, lalu berperan sebagai penghubung antar satu bank dengan bank lainnya. Dalam hal ini bank tersebut dikenal dengan *bank intermediary*.Penurunan pada suku bunga PUAB berdampak terhadap penurunan tingkat suku bunga kredit yang mengakibatkan permintaan terhadap kredit masyarakat akan meningkat baik dengan tujuan untuk modal kerja maupun untuk aktivitas konsumsi. Sehingga akan meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi lalu menyebabkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan inflasi (Perry Warjiyo ,2002), Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana (2018) menyimpulkan bahwa pengaruh suku bunga PUAB terhadap tingkat inflasi dapat dilihat dengan hasil *Impulse response* terlihat kontribusi shock PUAB terhadap inflasi terlihat cenderung menurun, sehingga diketahui jika terjadi kenaikan suku bunga PUAB maka IHK akan menurun. Penurunan IHK ini kemudian menggambarkan terjadi penurunan pula pada tingkat inflasi di Indonesia.

3.2 Instrumen Kebijakan Moneter Syariah dalam Pengendalian Inflasi

Langkah pengendalian Inflasi di Indonesia melalui jalur syariah yaitu dengan menggunakan berbagai intrumen-instrumen moneter syariah untuk mengatur jumlah

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 2, No. 2, 2020
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah

uang yang beredar (M2). Oleh sebab itu kebijakan moneter untuk mengontrol tingkat inflasi juga dilakukan dengan menggunakan instrumen moneter syariah baik dalam bentuk kebijakan moneter ekspansif maupun kontraktif. Ekonomi islam terfokus pada pendistribusian kekayaan yang merata untuk meningkatkan perrmintaan secara agregat. Sehingga mampu mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis baik dengan investasi maupun pengelolaannya sehingga terjadi penciptaan uang yang didukung dengan peningkatan sektor produksi yang tidak memicu inflasi di masyarakat (Shahzad, 2012)

Kiaee (2007) mengungkapkan dalam kebijakan moneter islam terdapat beberapa instrumen yang mampu menjadi pengganti instrumen berbasis bunga seperti saham komersial dalam bentuk sertifikat musyarakah dengan dasar PLS yang dijual pada publik dalam rangka mengontrol volume uang yang beredar Instrumen yang dimaksud juga dapat berupa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan kebijakan sektor Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Penelitian tersebut sejalan dengan Rahardja dan Manurung (2001), saat BI menerbitkan SBIS kemudian menjualnya di masyarakat akan menurunkan JUB yang merupakan salah satu target dalam rangka penetapan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakanitu dilakukan saat perekonomian beroperasi terlalu kuat sehingga menyebabkan tingginya inflasi. Dengan demikian ketika JUB berkurang diharapkan akan mengurangi permintaan barang yang menyebabkan*demand pull-inflation* sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana (2018) melalui anilisis estimasi VECM yang telah dilakukan, menunjukan variabel SBIS secara jangka panjang bersifat negatif serta signifikan berpengaruh pada inflasi. Jika tingkat bagi hasil pada SBIS meningkat maka akan menyerap dana likuid pada bank yang berlebih sehingga kemudian mampu mengurangi uang beredar pada masyarakat serta akan menurunkan tingkat inflasi. Selain itu menurut Daniar (2016) dimana mekanisme transmisi kebijakan moneter jalur syariah terhenti pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal harusnya inflasi dan pertumbuhan ekonomilah yang selanjutnya mempengaruhi bagi hasil dari SBIS, sehingga dengan demikian akan tercipta mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berkesinambungan.

Ascarya (2010) mengungkapkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah terhadap tingkat inflasi dikarenakan tingkat pendapatan SBIS pada saat berbentuk SWBI tidak mengacu pada nilai SBI konvensional sehingga nilainya cenderung kecil, dan menyebabkan masyarakat tidak terlalu menyukai SWBI untuk berinvestasi. Selain itu kebijkan lainnya yakni PUAS diindikasi akan berjalan dengan efektif apabila fungsi intermediasi bank berjalan secara optimal. Secara teknis ekspansi yang dilakukan pada transaksi dengan PUAS akan meningkatkan deposito serta kredit di perbankan sehingga juga akan meningkatkan investasi dan output secara aggregat. Sehingga pengaruh PUAS terhadap Inflasi adalah berpengaruh tidak searah (negatif). Alasannya adalah peningkatan PUAS juga akan meningkatkan produksi sehingga penawara akan barang juga naik, maka akan mengurangi laju inflasi.

PUAS digunakan dengan tujuan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan likuditas perbankan syariah dengan jual beli surat berharga syariah diikuti dengan janji membeli kembali *(repurchase agreement)* atau disebut transaksi repo syariah. Namun bank syariah lebih selektif dalam memanfaatkan instrumen PUAS dikarenakan faktor kecukupanatas likuiditas yang dapat dilihat dari dana yang masuk dalam bentuk *Financing to Debet Rasio (FDR)* atau pembiayaan di masing-masing bank syariah. Sehingga bank-bank lebih memilih fasilitas *repuchasing agreement (repo)*, gadai SBIS

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 2, No. 2, 2020
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah

atau Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) yang lebih beresiko rendah dan likuid. Oleh karena itu, karena rendahnya transaksi bank syariah dengan PUAS menunjukkan bahwa dampak PUAS terhadap IHK relatif rendah, begitupula dengan inflasi.

Wicaksana (2018) dalam penelitiannya mengunggapkan jika PUAS disini juga tidak bisa mempengaruhi inflasi secara signifikan. Bank Indonesia diharapkan mampu menggunakan *diskonto rate* untuk mempengaruhi imbal bagi PUAS dalam menekan tingkat inflasi. *Diskonto rate* bagi Bank Umum adalah biaya untuk pinjaman yang diberikan Bank Sentral, sehingga keinginan Bank Umum untuk meminjam kepada Bank Sentral mengecil, akibatnya kemampuan Bank Umum dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat juga ikut menurun, sehingga mampu mengurangi tekanan tingkat inflasi.Namundisamping itu instrumen Syariah yang pada dasarnya menggunakan sisitem PLS, seperti pada akad mudharabah melalui pembiayaan, berpengaruh secara positif terhadap output di sektor riil, namun berpengaruh negatif di sektor finansial terutama pada Inflasi.

3.3 Konsep Pengendalian Inflasi Melalui Motif Permintaan Uang

Grauwe dan Polan (2005) mengemukakan jika para peneliti monetarist menemukan jika penyebab utama inflasi adalah permintaan uang, dimana saat jumlah uang yang beredar dalam jumlag yang besar dengan tujuan konsumsi sementara pasokan barang konstan maka akibatnya terjadi kenaikan harga. Upaya untuk mengatur berbagai komponen permintaan uang melalui mekanisme tingkat bunga cenderung menekan permintaan uang untuk pemenuhan kebutuhan dan investasi produktif daripada untuk penggunaan yang tidak produktif dan spekulatif, sehingga mengganggu realisasi tujuan. Selain itu, karena permintaan uang terkait dengan konsumsi yang mencolok dan spekulasi cenderung relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan dan investasi produktif, tingkat ketidakstabilan yang tinggi disuntikkan ke seluruh perekonomian. Pada dasarnya permintaan uang tidak hanya bergantung pada tingkat suku bunga, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti ekspektasi inflasi, ekspektasi bisnis, serta profitabilitas dalam lingkungan investasi. Dengan kontrol melalui kebijakan moneter berbasis suku bunga, BI dapat mengatur suku buka dalam perekonomian serta penentuan jumlah obligasi yang akan diperjualbelikan di OPT.

Sederhananya, perbedaan mendasar antara kebijakan moneter modern dan kebijakan moneter Islam dilihat dari asumsi utama dalam pemahaman mendasar tentang motif permintaan uang, dan instrumen kebijakan moneter berbasis bunga dan tidak berbasis bunga. Sementara dalam tujuan jangka pendek, kebijakan konvensional-Islambersama untuk meningkatkan optimalisasi tingkat produksi dan menjaga stabilitas harga.

Ekonom Islam Muhammad Taqi Usmani (2004) juga mengungkapkan jika faktor lain yang memicu terjadinya inflasi adalam penerapan dari sistem ekonomi konvensional itu sendiri. Hal itu didasarkan pada kebebasan pasar yang diciptakan. Terjadinya praktik yang tidak alami dalam pasar seperti perjudian serta spekulatif sehingga menyebabkan pemusatan kekayaan yang tidak merata. Selain itu motif untuk mendapatkan keuntungan juga tidak mampu dikendalikan sehingga terjadi monopoli bukannya persaingan yang sehat. Pada kesimpulannya Taqi (2004) menganggap jika tidak adanya peran agama dalam kehidupan bisnis dan individu menyebabkan sistem ekonomi konvensional tidak mampu mengatasai permasalah ekonomi secara komperhensif termasuk dalam proses mendapatkan hingga membelanjakan uang secara syariah sehingga memicu timbulnya permasalahan inflasi.

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 2, No. 2, 2020
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah

Solusi dalam mengatasi tingginya inflasi dilalui dengan beberapa cara, diantaranya : perlunya reformasi pada sistem moneter dengan cara menyeimbangkan kuantitas produksi dan kuantitas uang, tidak membelanjakan barang secara berlebihan serta tidak bermanfaat, tidak diperbolehkannya kegiatan menimbun harta serta mendorong untuk melakukan investasi, peningkatan produksi dan perluasan lapangan kerja sebagai sumber pendapatan masyarakat baik materi maupun moril, serta menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok. Inflasi juga dapat dikontrol dengan berbagai cara sesuai syariah baik dalam pengelolaan kebijakan moneter maupun fiskal, seperti : penggunaan instrument uang yang stabil (dinar dan dirham), menihilkan suku bunga (riba) atau biasa disebut *zero interest*, meningkatkan kegiatan produksi secara rill dan investasi untuk menyerap uang yang beredar dalam masyarakat, tidak melakukan permintaan uang dengan motif spekulasi (*maysir)* serta mengoptimalkan pendapatan melalui zakat sebagai bentuk isntrumen kebijakan fiskal.

4. Kesimpulan

Mekanisme transmisi kebijakan moneter dengan jalur konvensional dalam mengendalikan inflasi ialah melaluikebijakan melalui jalur suku bunga yang akan berpengaruh pada nilai SBI, dan di respon oleh PUAB yang dilakukan oleh BI. Perubahan suku bunga PUAB lalu berdampak pada intensitas permintaan kredit maupun deposito dari perusahaan dan rumah tangga sehingga akan memengaruhi Jumlah Uang Beredar di masyrakat dan pada akhirnya mampu mengendalikan tingkat inflasi.

Namun pada instrumen kebijakan moneter jalur syariah dengan menggunakan SBIS dan PUAS dengan system Profit and loss sharing (PLS) dari berbagai hasil penelitian yang di analisis menemukan jika alur mekanisme dengan transmisi kebijakan moneter jalur syariah belum mempunyai hubungan yang jelas dan signifikan pada inflasi, dimana inflasi harusnya akan mempengaruhi SBIS sehingga dengan demikian akan menjadikan suatu mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berkesinambungan. selain itu pengaruh PUAS secara langsung terhadap IHK relatif rendah, begitupula dengan inflasi. Hal ini dikarenakan apabila PUAS mengalami peningkatan juga akan memningkatkan produksi sehingga penawaran terhadap barang bertambah, maka akan menekan inflasi. Namun pengaruhnya masih sangat kecil hal ini dikarenakan tingkat aktivitas pada PUAS masih tergolong sedikit akibat dari besaran dana likuid yang dilihat dari besaran dana yang masuk dengan dana yang tersalurkan.

Selain itu faktor utama terjadinya inflasi adalah jumlah uang beredar yang terlalu banya. Sehingga masyarakat harus sadar dan bijak dalam melakukan permintaan uang dengan motif tidak untuk spekulasi. Uang yang dimiliki bisa dialihkan ke hal produktif dengan melakukan investasi serta menggunakan uang untuk motif konsumsi sesuai dengan kebutuhan. Sehingga hal tersebut mampu mengendalikan jumlah uang beredar dan pada akhirnya menekan laju inflasi.

Daftar Pustaka

Afaqa Hudaya, *Analisis Kurs, Jumlah Uang Beredar, dan Suku Bunga SBI terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2001-2010*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)

Akhmad Rifanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jualah dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.* (Surabaya:Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009).

Ardianing Pratiwi, "Determinan Inflasi di Indonesia : Analisis Jangka Panjang dan Pendek", Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang (2016)

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 2, No. 2, 2020
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah

Ascarya., "Transmission Channel And Effectiveness Of Dual Monetary Policy In Indonesia". Working Paper. Bank Indonesia (2010)

Boschen, John F. and Weise, Charles L.."What Starts Inflation: Evidence from the OECD", Journal of Money, Credit and Banking, 35 &5,(2003)

Daniar, "Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa", Jurnal Falah Ekonomi Islam 1 &1, (2016).

Evi M. Bayuni dan Popon Srisusilawati, "Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi Di Indonesia", Jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2 & 1. (2018)

Grauwe, Paul De and Polan, Magdalena, "Is Inflation Always and Everywhere a Monetary Phenomenon?", The Scandinavian Journal of Economics, 107 & 5 (2005)

Heri Sudarsono, "Analisis Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah dalam Mempengaruhi Tingkat Inflasi",Jurnal Ekonomi dan Keuangan Isla, 3 & 2, (2017), h.53-64.

Kiaee, Hasan, *Monetary Policy in Islamic Economic Framework Case of Iran*, (Tehran: Imam Sadiq University, 2007)

Marisa A Andriani dan Tika Widiastuti Tika, *"Pengaruh SBIS Dan PUAS Terhadap Tingkat Inflasi Melalui Operasi Moneter Syariah Pada Periode 2011-2015",* Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 3 & 6 (2016).

Miskhin, Frederic S, *The Economics of Money Banking, and Financial Markets. Pearson Education International*. (USA or Canada, Edisi 6, 2001)

Muhammad A Guntara,. "Komparasi Kebijakan Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2007I–2014IV", Prosiding Ilmu Ekonomi (2015)

Muhammad Alfian, "Efektifitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Pada Jalur Suku Bunga Periode 2005:07-2010:06", Jurnal Media Ekonomi, 9 &2 (2011)

Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance,* (Karachi: Maktaba ma'ariful Quran, 2004).

Muhammad Taqiyuddin, "Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Dan Nilai Tukar Rupiah Pada Us Dollar Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan." (Kajian Empiris Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2007- 2011)", Jurnal Profit, 6 &2 , (2012).

Natsir, "Analisis Empiris Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Jalur Suku Bunga", Majalah Ekonomi Falah, (2011)

Nikita Indi Kumala dan Suherman Rosyidi, "Komparasi Mekanisme Kebijakan Moneter Syariah dan Konvensional Melalui Jalur Harga Aset Terhadap Inflasi di Indonesia", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 4 & 10, (2017).dan Terapan, 4 & 10, (2017).

Perry Warjiyo dan Agung Juda, *Transmission Mechanisms of Monetary Policy in Indonesia,* (Jakarta: Bank Indonesia, 2002).

Perry Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan,* (Jakarta :Bank Indonesia, 2004

Prathama Rahardjo dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro.* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001))

Qudsi R.M Fauzi dan Meri I Hapsari,"Islamic Monetery Management : A Critical Overview". Dipresentasikan di 2nd International Conferencee on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP), (2009).

Asy-Syarikah
Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume 2, No. 2, 2020
ISSN (print) : 2656-6117
ISSN (online) : 2715-0356
Homepage : http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah

Rabin &Hermawan, "Analisis Shock Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka; Kasus Dua Sektor Ekonomi di Indonesia", Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 4&1, (2013)

Rifki Ismal, "Penelitian Ilmiah: Teori dan Aplikasi Teknis. Materi Presentasi Forum Riset Keuangan Syariah 2014", Institute Pertanian Bogor, (2014).

Rifqi Ismal. *Penelitian Ilmiah: Teori dan Aplikasi Teknis. Materi Presentasi Forum Riset Keuangan Syariah 2014*. (Bogor: Institute Pertanian Bogor, 2014)

Rogger Jeffery Hummel, "Death and Taxes, Including Inflation: the Public versus Economists", (2007)

Shahzad, Akmal et.al., "Islamic Financial System: A System To Defeat Inflation", Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 2 & 2, (2012).

Sheikh, Sulman Ahmed, "Proposal for a New Economic Framework Based on Islamic Principles"A Publication of Islamic Economics Project, (2011).

Sipayung dan Putri Tista Enistin, "Pengaruh PDB, Nilai Tukar dan Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi di Indonesia Periode 1993-2012", E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 2 &7, (2013).

Tai, PN & Sek, S,K., "Interest Rate Pass-Through and Monetary Transmission in Asia", International Journal of Economics and Finance, 4 & 2, (2011).

Umar U Leu, "Pengembangan Pasar Uang Syar'ah (Analisis Problem Pasar Uang Syari'ah)", Jurnal La Maysir, 3 &1, (2016)

Wicaksana, Inflasi Di Indonesia Pada Periode 2011-2015: Analisis Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Pasar Uang Antar Bank, Pasar Uang Antar Bank Syariah, Finance To Deposit Ratio Dan Loan To Deposit Ratio, Jurnal Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 5 & 2,(2018)

Yan, Y & Samba, M.C., "Interest Rate Pass-Through in the Central African Economics and Monetary Community (CAEMC) Area: Evidence from an ADRL Analysis", International Journal of Business and Management,5 & 1 (2010)